



**PERAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA CURUG SEWU
UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh:

Radika Ayu Erriawati
NIM 3301415008



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Skripsi

pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Agustus 2019.

Menyetujui,

Pembimbing Skripsi



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.

NIP. 197303312005012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP.196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

\ Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

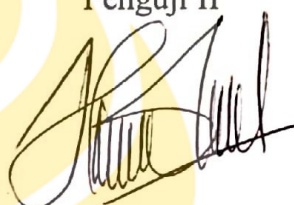
Tanggal : 12 September 2019

Penguji I




Dr. Sunarto, S.H., M.H.
NIP. 196306121986011002

Penguji II



Novia Wahyu Wardani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198811022015042001

Penguji III



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini diikuti atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 20 Agustus 2019



Radika Ayu Erriawati

NIM 3301415008

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. (Jusuf Kalla)
- ❖ Awali setiap kegiatan dengan sebuah perencanaan yang baik. (Radika Ayu Erriawati)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Bapak Jumari dan Ibu Erni Setyowati terimakasih atas doa dan dukungan di setiap langkah yang aku jalani.
2. Nenek dan Kakek, Suharni dan (Alm) Ripto yang telah merawat sedari kecil sampai bisa menempuh pendidikan di UNNES.
3. Adikku Iwan Wahyu dan seluruh keluarga besarku di Kendal
4. Vinda Prasetyo yang selalu setia dan ada memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan skripsiku hingga selesai.
5. Teman-Teman seperjuangan Ikayanti, Melisa, Nindita, Anna, Fitriya, Daniar, Rizal, Ardi, Egy, Arbain, Dwi, Choi, Pawuri, Reni, Albesty, dan Dini.
6. HIMA PKN yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan memberi rasa kekeluargaan di kampus
7. Teman-teman seperjuangan PPKn Angkatan 2015 kalian akan menjadi kenangan di hati.
8. Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Curug Sewu Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal” dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan, dorongan, semangat, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Penguji I yang telah memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Novia Wahyu Wardani, S.Pd., M.Pd., selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si., selaku Penguji III sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam menyusun skripsi ini.
7. Dr. Eko Handoyo, M.Si., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis sebagai mahasiswa, sehingga dapat menempuh perkuliahan dengan baik.

8. Segenap Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
9. Seluruh pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin serta memberikan informasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak pengurus obyek wisata Curug Sewu dan Bakeuda Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin serta memberikan informasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Orangtuaku tercinta, Ibu Erni Setyowati dan Bapak Jumari yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
12. Vinda Prasetyo yang senantiasa mendukung dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Rekan-rekan seperjuangan PPKn angkatan 2015 yang senantiasa memberikan pemikiran-pemikiran maupun saran selama proses penulisan skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Agustus 2019

Radika Ayu Erriawati

SARI

Erriawati, Radika Ayu. 2019. *Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Curug Sewu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. 251 halaman.

Kata Kunci : Kegiatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Pengelolaan, Obyek Wisata Curug Sewu, Pendapatan Asli Daerah.

Obyek wisata Curug Sewu memiliki potensi yang besar sebagai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal, tetapi pada kenyataannya masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Pengelolaan yang belum maksimal karena obyek wisata ini masih dikelola oleh dua instansi yang berbeda yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan KPH Perhutani yang menyebabkan kurangnya promosi yang dilakukan, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum mengakomodir semua kepentingan wisatawan, dan fasilitas-penunjang masih belum dirawat dengan baik. Disisi lain juga kurangnya tingkat kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal, dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dan Obyek wisata Curug Sewu. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Pengelola obyek wisata Curug Sewu, pedagang dan wisatawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal yaitu melakukan pembinaan kepada pegawai, pengelola, dan pemandu wisata, melakukan sosialisasi, dan mempromosikan obyek wisata Curug Sewu. Pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Faktor penghambat secara internal terdiri dari faktor sumber daya manusia (SDM) dan faktor anggaran. Faktor eksternal terdiri dari faktor alam, faktor lokasi, faktor fasilitas, dan faktor promosi.

Saran kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal yaitu; perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan profesionalisme SDM dengan cara mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar pendidikan dan pengalaman di bidang pariwisata, menyediakan pawang untuk menangani kera-kera liar yang ada di obyek wisata Curug Sewu, memperbanyak akses informasi yang dapat mendukung promosi, dan lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di obyek wisata Curug Sewu.

ABSTRACT

Erriawati, Radika Ayu. 2019. The Role of Youth, Sports, and Tourism Office in Managing of Sewu Waterfalls Tourism Destination To Increase the Local Government Revenue (PAD) of Kendal District. Essay. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor: Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Sc. 251 page.

Keywords: Activity, the Department of Youth, Sports, and Tourism, Management, Curug Sewu Tourism Object, Local Revenue.

Curug Sewu tourism object has a great potential as a contribution to the Regional Original Revenue (PAD) of Kendal Regency, but in reality it is still faced with various obstacles. Management that has not been maximized because this tourism object is still managed by two different agencies, namely the Office of Youth, Sports, and Tourism and the Forestry KPH which causes a lack of promotion, facilities and infrastructure that are available still do not accommodate all the interests of tourists, and supporting facilities are still not treated properly. On the other hand there is also a lack of tourist awareness in maintaining environmental hygiene. The purpose of this study is to find out the activities carried out by the Department of Youth, Sports, and Tourism in the management of Curug Sewu tourism objects to increase Regional Original Revenue (PAD) of Kendal Regency, and identify what factors are obstacles to the Department of Youth, Sports, and Tourism in object management Curug Sewu tourism.

This study uses a qualitative method. Research locations in the Department of Youth, Sports, and Tourism Kendal Regency and Curug Sewu Tourism Object. The subjects in this study were the Department of Youth, Sports, and Tourism, Managers of Curug Sewu attractions, traders and tourists. Data collection techniques used were interviews, documentation, and observation. Test the validity of the data in this study using source triangulation techniques. Data reduction techniques for collecting data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the activities carried out by the Department of Youth, Sports, and Tourism of Kendal Regency are to provide guidance to employees, managers, and tour guides, to conduct socialization, and promote Curug Sewu tourism objects. Management is carried out starting from planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating. Internal inhibiting factors consist of human resources (HR) and budget factors. External factors consist of natural factors, location factors, facility factors, and promotion factors.

Suggestions to the Department of Youth, Sports, and Tourism of Kendal Regency namely; efforts need to be made to overcome the problem of HR professionalism by proposing recruitment of employees who have educational background and experience in tourism, providing handlers to handle wild monkeys in Curug Sewu tourism objects, increasing access to information that can support promotion, and paying more attention existing facilities in the tourist attraction Curug Sewu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	15
A. Deskripsi Teoritis	15
1. Peran.....	15
2. Pengelolaan	18
3. Pariwisata	32
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
5. Keuangan Daerah	43
6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. 46	
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan.....	47
C. Kerangka Berfikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Latar Penelitian	55
B. Fokus Penelitian	56
C. Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Uji Keabsahan Data	61
F. Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	68
1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	68
2. Obyek Wisata Curug Sewu	76
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Obyek Wisata Curug Sewu Kabupaten Kendal	83
B. Hasil Penelitian	85
1. Kegiatan Yang Dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Curug Sewu Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal	85
2. Faktor Penghambat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Curug Sewu dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal	114
C. PEMBAHASAN	124
1. Kegiatan Yang Dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Curug Sewu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal	124
2. Faktor Penghambat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam Pengelolaan obyek wisata Curug Sewu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.	135
BAB V PENUTUP	139
A. Simpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL	201

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Kendal	4
Tabel 1.2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Curug Sewu	5
Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan obyek wisata Curug Sewu tahun 2013-2017	6
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	58
Tabel 4.1 Jumlah pengunjung obyek wisata Curug Sewu tahun 2018	81
Tabel 4.2 Pendapatan obyek wisata Curug Sewu tahun 2018.....	82
Tabel 4.3 Kontribusi Obyek Wisata Curug Sewu Terhadap PAD	84
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pariwisata.....	89
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai dalam penempatan dan pembagian tugas	93
Tabel 4.6 Kegiatan pembinaan untuk para pegawai bidang pariwisata	97



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian	54
Bagan 3.1 Komponen dalam analisis data (<i>Interactive model</i>)	67
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	75



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Obyek Wisata Curug Sewu	76
Gambar 4.2 <i>Icon</i> obyek wisata Curug Sewu	77
Gambar 4.3 Penempatan dan pembagian tugas di pintu masuk Curug Sewu	94
Gambar 4.4 Pembinaan kepada pegawai melalui Bimtek	98
Gambar 4.5 Pembinaan kepada pengelola obyek wisata Curug Sewu	99
Gambar 4.6 Pembinaan kepada Pemandu Wisata	101
Gambar 4.7 Promosi melalui media pamflet.....	108
Gambar 4.8 Kunjungan dan Pengawasan dari DISPORAPAR.....	111
Gambar 4.9 Fasilitas permainan <i>jet coster</i> yang mangkrak	123



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi	147
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas	148
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian KESBANGPOL	149
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian BAPERLITBANG	150
Lampiran 5 Surat Telah Melakukan Penelitian	151
Lampiran 6 Instrumen Penelitian	152
Lampiran 7 Pedoman Observasi	163
Lampiran 8 Pedoman Wawancara	166
Lampiran 9 Transkrip Wawancara	173
Lampiran 10 Struktur Organisasi	193
Lampiran 11 Pendapat Obyek Wisata Curug Sewu	194
Lampiran 12 Foto Dokumentasi	195
Lampiran 13 Surat Tugas Sidang Skripsi	199
Lampiran 14 Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal	200
Lampiran 14 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016	205

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri seluas-luasnya dalam mengatur urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu daerah juga berhak untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang dimiliki untuk membiayai pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapat daerah diatur juga dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sumber sumber tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendaptan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah) (Enceng, 2018:54). Selain itu

pemerintah daerah juga menggali potensi-potensi lain yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut dari sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor jasa, sektor perdagangan, sektor parkir, dan lain-lain.

Pariwisata di era globalisasi saat ini, merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa negara. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya (Pendit, 2003:33).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa keberadaan sektor pariwisata sangat potensial. Adanya Obyek wisata yang dimiliki oleh suatu daerah, akan sangat menguntungkan dalam meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan rasa cinta untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya yang ada. Hal tersebut tentunya akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensi yang dimiliki. Meski sektor pariwisata hanya menyumbang sedikit namun harapannya sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah secara

bertahap. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dibutuhkan manajemen dan tata pengelolaan pariwisata yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Sektor pariwisata saat ini merupakan sektor yang terus dikembangkan dan dikelola pemerintah terutama oleh pemerintah daerah. Dimana pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan sebagai penyumbang pendapatan daerah. Hal ini Perlu adanya pengelolaan secara tersusun dan terencana agar memperoleh hasil yang optimal bagi daerah dan layak menjadi potensi unggulan. Pengelolaan potensi wisata yang dimiliki terus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa daerah kota/kabupaten, tidak terkecuali di Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi wisata yang cukup bagus. Beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Kendal antara lain obyek wisata Curug Sewu, Pantai Sendang Sekucing, Kolam Renang Boja, Tirta Arum, Santoso Stabel, dsb. Pemerintah Kabupaten Kendal tengah gencar melakukan pengembangan pariwisata yang menjadi potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Perkembangan pariwisata Kabupaten Kendal yang baik dapat meningkatkan pendapatan dari bantuan kontribusi sektor Pariwisata, diharapkan Kabupaten Kendal mampu memunculkan persaingan suatu daerah. Kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kendal sendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Pendapatan sektor pariwisata terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Kendal

Pendapatan					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.029.702.	215.294.086.	239.564.403.	265.298.572	404.911.988
Sektor pariwisata	522.00	780.00	981.00	.582.00	.883
		1,027,777,74	1,084,395,00	1,350,000,00	1.442.707.000.000

Sumber: Badan Keuangan (BAKEUDA) Kabupaten Kendal

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan setiap tahunnya dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal. Hal ini tentunya sektor pariwisata di Kabupaten Kendal sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal. Salah satu sektor pariwisata yang menyumbang pendapatan daerah yaitu Obyek wisata Curug Sewu.

Salah satu obyek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Kendal yaitu Obyek Wisata Curug Sewu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang bekerjasama dengan KPH Perhutani Kabupaten Kendal, kerjasama ini dilakukan dalam hal pengembangan kawasan wisata. Pemda Kabupaten Kendal mengelola fasilitas-fasilitas penunjang di kawasan Obyek Wisata Curug Sewu meliputi taman rekreasi, kebun binatang mini dengan koleksi satwa beragam, fasilitas pelengkap lainnya seperti panggung hiburan, taman bermain anak serta kereta mini, dan kolam renang. Sedangkan dari pihak KPH

Perhutani hanya mengelola wisata alam berupa hutan wisata dan air terjun, hal dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan fungsi hutan secara optimal, serba guna dan lestari dengan tetap mempertahankan aspek konservasi, keserasian dan keseimbangan lingkungan serta tidak merubah bentuk aslinya.

Obyek wisata Curug Sewu merupakan obyek wisata yang cukup dikenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan serta menjadi andalan utama di sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, obyek wisata ini juga mempunyai potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut berupa daya tarik, seperti pemandangan alam, adanya obyek wisata air terjun, dan hutan wisata. Dengan berbagai obyek dan daya tarik wisata serta fasilitas yang telah disediakan oleh pihak pengelola tersebut menjadikan kawasan wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Curug Sewu Kabupaten Kendal tahun 2013-2017

	Jumlah Pengunjung (orang)
2013	78.346
2014	94.204
2015	92.555
2016	83. 131
2017	86. 405
Jumlah	434,641
Rata-Rata	86,928

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan sebuah kegiatan pariwisata dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut diketahui terjadi penurunan 2015 sampai 2016 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan, hal tersebut dikarenakan adanya peralihan pengelola dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. sehingga pengelolaan yang dilakukan di obyek wisata Curug Sewu tidak dilakukan dengan baik. Di tahun 2017 dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mulai melakukan pembenahan pengelolaan obyek wisata Curug Sewu sehingga jumlah pengunjung tahun 2017 mulai mengalami kenaikan sebanyak 86.405 orang.

Sebagai salah satu obyek wisata yang cukup dikenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan, obyek wisata Curug Sewu sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencapaian pendapatan obyek wisata Curug Sewu dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan obyek wisata Curug Sewu tahun 2013-2017

Target	Pendapatan
	Rp. 513.000.000
	Rp. 841.907.000

Sumber: SPJ pendapatan obyek wisata Curug Sewu 2013-2017, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal

Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan obyek wisata Curug Sewu dari tahun 2013-2017 melebihi dari target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan pendapatan tiap tahunnya. Hal ini tentunya dapat menyumbang pendapatan daerah dari sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal. Peningkatan pendapatan yang diperoleh obyek wisata Curug Sewu tidak diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal, masih banyak permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata seperti halnya daerah-daerah lain dalam mengelola sebuah obyek wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, dkk dalam Jurnal tahun 2015 yang berjudul “Manajemen Penyelenggaraan Pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Resun di Kabupaten Lingga” menjelaskan bahwa pengelolaan wisata air terjun Resun di Kabupaten Lingga oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum maksimal, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata air terjun Resun di Kabupaten Lingga adalah sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan evaluasi yang harus dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata air terjun resun agar tujuan bisa tercapai.

Penelitian lain yang relevan yaitu terkait ”Strategi pengembangan obyek wisata Air Terjun Temburun” oleh Maisarah pada tahun 2018. tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan obyek wisata Air Terjun Temburun di Kabupaten Kepulauan

Anambas. Kesimpulan dari penelitian ini yakni secara keseluruhan strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas belum maksimal. Maka dari itu diperlukan pengelolaan obyek wisata yang baik, agar fasilitas dan aksesibilitas dapat digunakan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan, masih belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan Dinas Pariwisata, berbagai faktor penghambat yang dialami dalam mengelola obyek wisata air terjun. Sama halnya dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu di Kabupaten Kendal, meskipun obyek wisata Curug Sewu memiliki potensi yang besar sebagai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal, akan tetapi pada kenyataannya obyek wisata Curug Sewu masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu. Pengelolaan yang belum maksimal karena obyek wisata ini masih dikelola oleh dua instansi yang berbeda yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan KPH Perhutani yang menyebabkan kurangnya promosi yang dilakukan, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum mengakomodir semua kepentingan wisatawan, dan fasilitas-fasilitas penunjang masih belum dirawat dengan baik. Disisi lain juga kurangnya tingkat kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2019, menurut Bambang Sukoco, selaku Kasi Destinasi Wisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, mengatakan bahwa pengelolaan obyek wisata Curug Sewu

selama ini belum bisa maksimal karena memang obyek wisata ini masih dikelola oleh 2 instansi. Pengelolaan yang paling susah dari sumber daya manusia dan para wisatawan. Kurang pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas oleh petugas yang ada, menyebabkan banyak wisatawan masih membuang sampah sembarangan, tidak menjaga fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti mencoret-coret gardu pandang dan merusak toilet. Banyaknya fasilitas yang tidak terawat dan rusak tentunya dapat menyebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Curug Sewu menurun, hal ini bisa menurunkan pendapatan dan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu tentu menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal sebagai instansi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu sebagai obyek wisata andalan yang mampu menyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PERAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA, DAN PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA CURUG SEWU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KENDAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa saja kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis mengenai perkembangan pengetahuan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dari pengelolaan objek wisata Curug Sewu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Curug Sewu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.
- b. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan masukan sekaligus evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang berperan dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal.
- c. Bagi Pembaca, diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya terkait dengan usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata yaitu pengelolaan objek wisata, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

E. Batasan Istilah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah diperlukan adanya batasan-batasan yang berkaitan dengan judul skripsi. Batasan istilah tersebut sebagai berikut.

1. Peran

Kahn (dalam Agustina, 2009:42) berpendapat bahwa peran (*role*) mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Peran yang dimaksud dalam penelitian adalah peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan kewajiban, kekuasaan, serta tanggung jawab yang menyertainya sesuai tugas dan fungsinya di pemerintahan daerah sebagai instansi yang mengelola obyek wisata Curug Sewu.

2. Pengelolaan

Adisasmita (2011:21) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengelolaan adalah serangkaian kegiatan mengurus obyek wisata Curug Sewu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

3. Pariwisata

Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisata, pada Bab 1 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Obyek wisata (*tourist object*) diartikan sebagai segala objek yang dapat menimbulkan daya Tarik bagi para wisatawan untuk mengunjunginya (Ngafenan, 1996:197). Pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan wisata yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yaitu obyek wisata Curug Sewu.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Widjaja, 2007:78). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal yang bersumber dari sector pariwisata salah satunya melalui pengelolaan obyek wisata Curug Sewu.

5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Dalam penelitian ini Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang
dimaksud adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten
Kendal sebagai pengelola obyek wisata Curug Sewu.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamisasi kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Sebab peran merupakan faktor penentu apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang dan pemberi kesempatan bagi pemerannya. Setiap orang memiliki peranan dari pola-pola pergaulan sosial yang menentukan perilaku dan kesempatan-kesempatan yang diperolehnya. Peran lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2014:210). Dengan menduduki posisi tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang diduduki tersebut. Hal ini berarti bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.

Kahn berpendapat bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran

mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lainnya, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain (Agustina, 2009:42).

Sedangkan menurut pendapat Coser, peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang berhubungan dengan posisi sosial atau perilaku khas. Beberapa ahli teori telah meletakkan gagasan bahwa peran pada dasarnya adalah harapan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sesuai dengan yang diberikan situasi, sementara yang lain menganggap itu berarti bagaimana individu benar-benar berperilaku dalam posisi sosial tertentu (Sesen, 2015:139).

Peran dalam kelompok terdiri atas: (1) peran yang dirasakan adalah serangkaian perilaku yang dianggap harus dilakukan oleh orang yang menduduki posisi yang bersangkutan; (2) peran yang dimainkan adalah perilaku yang benar-benar dilakukan oleh seseorang. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, serta kekuasaan dan tanggungjawab yang menyertainya. Fungsi peran ini dapat dilakukan dengan sistem sosial. Peran merupakan perilaku yang berbeda-beda setiap individu (Siswanto, 2017:81).

Menurut teori Biddle & Thomas membagi peristilahan teori perann dalam empat golongan, yaitu (a) orang-orang yang mengambil bagian dalam interkai sosial, (2) perilaku yang muncul dalam interkasi tersebut, (3)

kedudukan orang-orang dalam perilaku, (4) kaitan antara orang dan perilaku (Sarwono, 2013:215).

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Atas dasar tersebut Soekanto (2014:211) menyimpulkan bahwa suatu peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga.
- c. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan seseorang apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai posisi sosial dalam masyarakat maka ia telah menjalankan sebuah peran.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Pintar Memilih Sinonim Indonesia-Inggris (Podo, 2010:279) kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen dalam Bahasa Inggris yaitu *manage*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008:674) menyebutkan bahwa pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan yang mendapat imbuhan pe-an menjadi pengelolaan yang berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan pencapaian tujuan. Sedangkan manajemen yaitu cara mengelola suatu perusahaan, proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.

Pengelolaan merupakan pengertian sempit dari kepemimpinan, pengelolaan merupakan jenis kepemimpinan yang khusus, yang paling penting dalam pengelolaan adalah tercapainya tujuan organisasional lembaga. Perbedaan antara kepemimpinan dan pengelolaan adalah kata organisasi (*organization*). Dengan latar belakang perbedaan itu, pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan lewat orang-orang secara pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasional

lembaga. Seorang pemimpin dapat mencapai tujuannya sendiri atau membantu orang lain mencapai tujuan. Pengelolaan terutama harus ditunjukkan untuk pencapaian tujuan kelompok atau lembaga (Keating, 1995:75).

Adisasmita (2011:21) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “**kelola**” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses menurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Terry (2005:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Leiper (1990:256), Pengelolaan (*manajemen*) merujuk pada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk ada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen adalah *planning, directing, organizing, dan controlling*.

Moekijat (2000:1) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan dan mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko (2009:4) manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sama seperti manajemen yaitu merupakan serangkaian proses atau kegiatan mengurus atau menangani sesuatu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan evaluasi dengan mendayagunakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

b. Fungsi – Fungsi Pengelolaan

Pengertian pengelolaan sama seperti manajemen, begitu juga dengan fungsi pengelolaan juga sama dengan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut menurut para tokoh manajemen.

Menurut Handoko (2009:4) dibagi menjadi lima yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan Terry (2005:9) fungsi manajemen diantaranya adalah *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling*. Menurut Leiper (1990:256) fungsi manajemen yaitu

planning, directing, organizing, dan controlling. Berbeda lagi dengan pendapat Adisasmita (2011:21) ada tiga fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin secara berurutan supaya proses manajemen diterapkan secara baik.

Dari beberapa fungsi pengelolaan menurut para tokoh manajemen, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pengelolaan diantaranya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan/pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Penjelasan mengenai pengelolaan dalam penelitian ini terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan merupakan proses dasar dimana pengelolaan memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan ini merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan.

Perencanaan menurut Siswanto (2017:3) merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih

dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat (Handoko, 2009:78).

Menurut Handoko (2009:79) semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahapan berikut.

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara efektif
- b) Merumuskan keadaan saat ini
Pemahaman akan posisi organisasi dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi.

- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang mungkin menimbulkan masalah.
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan
Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian-penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses dasar dalam mempersiapkan kegiatan secara sistematis dan terencana dengan tahapan yang dilakukan serta mempertimbangkan kondisi yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumberdaya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Ada dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementasi dan pembagian kerja (Effendi, 2014:128).

Handoko (2009: 167) menjelaskan bahwa pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Sedangkan menurut Siswanto (2017:3) pengorganisasian merupakan proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentu hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka menyusun dan membentuk organisasi yang baik, tentunya perlu adanya prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman, beberapa prinsip-prinsip organisasi menurut Herujito (2006:111) yaitu:

- a) Perumusan tujuan organisasi dengan jelas
Dengan adanya perumusan tujuan organisasi, hal ini untuk mempermudah setiap orang bekerja sama mencapai tujuan.
- b) Pembagian pekerjaan
Organisasi sebenarnya merupakan suatu” sistem pembagian kerja. Oleh karena itu, struktur organisasi harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi seseorang yang dijalankan hendaklah digolong-golongkan sehingga merupakan kelompok-kelompok tugas pekerjaan
- c) Kontinuitas dan fleksibilitas
Artinya, kelangsungan dan kesinambungan sikap organisasi harus banar-benar terjamin, baik dalam perencanaan, sasaran, program, maupun kegiatan pelaksanaan (operasional).
- d) Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang
Tidak terlalu ketat, namun harus juga memperhatikan adanya batas wewenang, yang dimaksud dengan wewenang atau otoritas (*authority*), yaitu hak untuk memerintah atau

bertindak. Sedangkan tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas.

- e) Kesatuan arah (*Unity of Direction*)
Semua kegiatan, pemikiran, keahlian, waktu dan kemampuan harus ditunjukkan pada satu arah, yaitu pencapaian tujuan dengan cara efisien dan efektif
- f) Kesatuan komando (*Unity of Command*)
Dengan adanya kesatuan komando maka kerja sama menjadi lebih terjamin dengan baik, pemusatan usaha dan pengendalian komando lebih terpusat.
- g) Rentang kekuasaan
Maksudnya, berapa jumlah orang yang setepat-tepatnya harus berada dibawah kekuasaan seorang pejabat atasan.
- h) Tingkat-tingkat pekerjaan atau *employment hierarchies*
employment hierarchies dapat diartikan sebagai suatu jaringan peranan yang dituntut orang dalam melaksanakan pekerjaan untuk tugas yang harus dicapai. *employment hierarchies* merupakan keharusan pokok untuk meletakkan pangkal berpijak bagi setiap pengawasan karena sesungguhnya pengawasan merupakan jaringan komunikasi dan merupakan *follow up* dari semua instruksi.

Dalam pengorganisasian tentunya terdapat langkah-langkah pokok proses pengorganisasian, Ernest Dale (Herujito, 2006:126) menguraikan proses pengorganisasian sebagai suatu proses multilangkah dan terpadu dan menggariskan langkah-langkah berikut.

- a) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b) Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
- c) Mengkelompokan aktivitas-aktivitas yang sama secara logis menjadi departemen-departemen dan menyusun skema kerja sama antar departemen.
- d) Menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis.
- e) Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumberdaya, dan lingkungan untuk mempermudah pencapaian target kinerja dalam sebuah organisasi dengan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang diterapkan. Sedangkan yang dimaksud pengorganisasian dalam penelitian ini adalah tentang penetapan dan penempatan individu tertentu pada tugas-tugas tertentu yang diberikan, serta pendelegasian wewenang kepada individu tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Pelaksanaan

Setelah rencana ditetapkan dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dibagi, maka tindakan selanjutnya adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut sehingga apa yang akan menjadi tujuan benar-benar tercapai.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, perlu adanya pergerakan yang dilakukan oleh pemimpin. Menurut Purwanto (2006:58) pergerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Kegiatan dalam fungsi pergerakan yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga yaitu; (a) mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara

efektif dan efisien, memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, (c) menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Setelah adanya pengarahan, maka kegiatan yang sudah direncanakan perlu segera dilaksanakan. Tjokroadmudjoyo (Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses yang dapat dipahami dalam bentuk rangkaian kegiatanyakni dari awal kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka keijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Selanjutnya Adisasmita (2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebuthan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individua tau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

4) Pengawasan

Fungsi pengawasan sangat penting tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Batlajery, 2016:137).

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak (Kaho, 2010:184).

Handoko (2009:359) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Manulang (2004:184) Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan: standar (alat pengukur); mengadakan penilaian (evaluate); dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*), dimana ketiga hal ini disebut juga sebagai “ proses pengawasan”. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan: (1) perubahan lingkungan organisasi, munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya; (2) peningkatan kompleksitas organisasi, banyaknya jenis produk baru

hal itu harus diawasi; (3) terjadinya kesalahan-kesalahan, apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer; (4) kebutuhan manajer, untuk mendelegasikan wewenang, terutama dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang manajer (Effendi, 2014:214).

Menurut Nukholis (2009:143), bentuk-bentuk evaluasi sesuai pelaku pengawasan meliputi:

1. Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.
2. Pengawasan fungsional
 - a. Pengawasan internal merupakan penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh internal auditor untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi tepat dan dapat dipercaya, apakah resiko organisasi dapat diidentifikasi dan diminimalisir, apakah peraturan eksternal dan kebijakan serta prosedur internal dapat diterima dan ditaati, apakah sumberdaya digunakan secara efisien dan ekonomis.
 - b. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga luar pemerintah kabupaten atau

kota yang khusus diberikan perintah untuk melakukan pengawasan. Tujuan pengawasan eksternal ini mendorong tercapainya *good corporate governance*. Pengawasan eksternal ini dilakukan bila kondisi benar-benar memerlukan.

Jadi dari uraian diatas, kesimpulannya bahwa pengawasan merupakan proses dan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

5) Evaluasi

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan organisasi telah memenuhi standar bahkan melampaui tujuan yang diharapkan, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilakukan sebelumnya secara sistematis dan obyektif (Nurkholis, 2009:136).

Menurut Mukhadis (Ulfatin 2018:149) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang sistematis dalam upaya menjangkau dan menganalisis informasi atau data yang relevan dengan teknik tertentu untuk membuat keputusan dengan menggunakan seperangkat alat pengukuran sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menyediakan masukan bagi pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan, kelanjutan, perluasan, penghentian, dan modifikasi program, serta penggunaan dan pengembangan landasan ilmiah yang mendasari proses penilaian (Apriansyah,dkk, 2017:2).

Ada beberapa alasan mengapa harus mengevaluasi kinerja. Pertama, evaluasi harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses manajemen dan kepemimpinan. Kedua, evaluasi memungkinkan atasan (manajer) dan bawahan (pegawai) untuk menyusun rencana bersama mengoreksi kesalahan bersama, memperbaiki kekurangan bersama, dan menegaskan hal-hal yang benar secara bersama. Ketiga, evaluasi harus melayani perencanaan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperhatikan kekuatan dan kekurangannya (Ulfatin, 2018:148).

Dalam evaluasi dikenal adanya instrumen kebijakan dengan istilah program dan kegiatan. Program adalah sebuah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program (Nurkholis, 2009:137).

3. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata dan Objek Wisata

Pariwisata pada dasarnya merupakan aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi dan Warman, 2014:8). Definisi pariwisata secara umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Sedangkan definisi pariwisata secara teknis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain (Karyono, 1997:15).

Menurut para ahli Bahasa dan pariwisata kata “pariwisata” berasal dari dua suku kata yaitu **pari** dan **wisata**. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling (Muljadi, 2010: 8).

Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan, pada Bab 1 pasal 1 ayat 3 menjelaskan mengenai pengertian pariwisata yang isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Obyek Wisata merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*). Di luar negeri obyek wisata disebut *tourist attraction* (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan obyek wisata. Obyek wisata (*tourist object*) diartikan sebagai segala objek yang dapat menimbulkan daya Tarik bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah, kebudayaan, dan pusat-pusat rekreasi modern (Ngafenan, 1996:197).

b. Pengelolaan pariwisata

1) Pengertian pengelolaan pariwisata

Pengelolaan (manajemen) menurut Leiper (1990:256) merujuk pada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk ada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen adalah *planning, directing, organizing, dan controlling*.

2) Prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan

komunitas sosial. Menurut Cox (Pitana dan Diarta, 2009:81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

- a) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan, peninggalan budaya, dan keunikan lingkungan.
- b) Konservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Faktor Penghambat pengelolaan pariwisata

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:505) mendefinisikan penghambat sebagai hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Dalam hal ini faktor penghambat merupakan suatu hal yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Menurut Pitana dan Diarta (2009:91) faktor penghambat dalam pengelolaan obyek wisata yaitu (a) infrastruktur yang mendukung wisatawan di setiap obyek wisata, (2) Sumber Daya Manusia (SDM), (3) Lingkungan yang kotor, (4) promosi.

d. Kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata

1) Konsep kebijakan pariwisata

Kebijakan (*policy*) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan, kebijakan ini tentunya mengandung unsur politik. Unsur politik juga terdapat dalam dunia pariwisata, antara politik dan pariwisata terdapat hubungan yang digaris bawahi oleh suatu kenyataan-kenyataan yang ada dalam kerangka dan tubuh politik itu sendiri secara keseluruhan. Pariwisata sendiri tidak dapat terlepas dari kegiatan-kegiatan politik suatu negara dimana industri pariwisata itu berbeda. Selain unsur politik, kompleksnya dalam industri pariwisata perlu adanya kebijakan hukum yang kuat untuk melandasi pertumbuhan pariwisata yang teratur dan terus menerus meningkat, untuk menentukan model tertentu baik di dalam maupun luar negeri untuk mematangkan suasana yang baik bagi penarahan investasi dalam sektor pariwisata (Wahab, 2003:180).

Kebijakan pariwisata menurut Akehurst (Pitana dan Diarta, 2009:107) adalah sebuah strategi untuk pengembangan sektor *tourism* yang menetapkan objektif dan pedoman sebagai dasar untuk apa yang perlu dilakukan, ini berarti mengidentifikasi dan menyetujui objektives; menetapkan prioritas; menempatkan dalam konteks masyarakat, peran pemerintah nasional, organisasi wisata nasional, pemerintah daerah, dan bisnis sektor swasta; membangun

koordinasi dan pelaksanaan program untuk sepakat memecahkan masalah yang diidentifikasi dengan monitoring dan evaluasi program.

Menurut Fayos-Sola (dalam Pitana dan Diarta, 2009:107) menjelaskan, perkembangan kebijakan pariwisata mengalami tiga tahapan generasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

- a) Paradigma kebijakan pariwisata massal
Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang sebesar-besarnya, dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata
- b) Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial
Periode ini dimulai tahun 19 70-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi berfluktuasi serta masa resesi yang Panjang. Dalam periode ini dampak social,ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah mulai disadari sementara pada pertumbuhan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai didefinisikan. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.
- c) Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (*holistik*)
Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Adanya Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbolik antara sektor. Diskusi kebijakan pembangunan pariwisata bergeser dari sisi konvensional seperti pemasaran, promosi, pajak, insentif, akomodasi dan transportasi menuju isu yang lebih holistik yang berkaitan dengan lingkungan dampak sosial, pemerataan, serta regulasi pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan kesehatan.

2) Strategi pembangunan pariwisata

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan pariwisata diperlukan strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah berikut.

- a) Menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama
- b) Menjadikan pariwisata nusantara sebagai pendorong pembangunan
- c) Meningkatkan ketangguhan kepariwisataan nasional
- d) Peningkatkan sumber daya manusia bidang kepariwisataan
- e) Peningkatan kemitraan masyarakat, swasta, dan media massa
- f) Peningkatan kerja sama lintas sektoral (Muljadi, 2010:73-78).

Untuk menanggulangi berbagai masalah dan potensi yang timbul dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan pariwisata. Perlu dilakukan serangkaian tindakan berbasis strategi:

- a) Kebijakan fiskal (*fiscal-policy*)
Dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi pengembangan pariwisata di berbagai daerah khususnya di Kawasan timur Indonesia, seperti *tax holiday*, pendudukan permodalan, bunga pinjaman yang kompetitif, dan sebagainya.
- b) Kebijakan investasi (*investment policy*)
Melalui penerapan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, yang kondusif terhadap pembangunan usaha pariwisata baru maupun pengembangan usaha yang telah ada.
- c) Pengembangan infrastruktur
Dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi pariwisata melalui pembangunan serta perluasan jaringan jalan, bandara, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, penyediaan listrik dan air bersih. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing dan daya Tarik dalam penyediaan fasilitas pariwisata di suatu daerah tertentu.
- d) Pengembangan SDM
Melalui peningkatan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara
- e) Koordinasi lintas sektor
Mengembangkan kemitraan antara seluruh *stakeholders* pembangunan kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi yang melibatkan Lembaga swadaya masyarakat, asosiasi/usaha pariwisata, DPR/ DPRD, maupun pemerintah (Muljadi, 2010: 79-80).

3) Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata

Menurut World Trade Organization (dalam Pitana dan Diarta, 2009:113) peran Pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut.

- a) Membangun kerangka (*framework*) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata
- b) Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diharapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya
- c) Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dengan kelengkapan sarana dan prasarana
- d) Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin Pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata
- e) Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya:
 - 1) Evaluasi kekayaan asset pariwisata, alam, dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestarian
 - 2) Identifikasi dan kategori produk pariwisata yang mempunyai.

e. Dampak Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, keamanan, dan sebagainya, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata. Dalam sosial ekonomi, menurut Cohen (dalam Pitana dan Gayantri, 2005:109-110). dampak pariwisata dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu:

- 1) Dampak terhadap devisa negara
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap harga-harga
- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2009:33). Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendaptan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, atarupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah) (Enceng, 2018:54).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman serta Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro (Widjaja, 2007:78).

Lestari (dalam Erawati dan Hurohman, 2017:130) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang mengatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja daerah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu daerah mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam mencapai tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang telah dimiliki.

Kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta

penerima yang dipungut oleh Pemerintah Daerah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai pewujudan desentralisasi.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pajak daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2008:7).

2) Retribusi daerah

Menurut Siahaan (2008:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil engelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan model perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Erlina, dkk, 2017:112).

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan garis kerugian daerah, penerimaan komisi, penggandaan

barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pariwisata, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya (Erlina, dkk, 2017:112).

5. Keuangan Daerah

a. Tinjauan Umum Keuangan Daerah

Otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merupakan tugas yang tidak mudah jika ditinjau dari upaya mewujudkan daerah yang mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Kaho, 2010:138).

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi

pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. tujuan keuangan daerah adalah

- 1) Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi;
- 3) Meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi, dan ekstensifikasi (Adisasmita, 2011:2).

Dibidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang (Sunarno, 2008:77).

Keuangan Daerah menurut Mamesah (1995:45) adalah semua hak dan kewajiban yang data dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan.

b. Sumber Keuangan Daerah

Suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah (Huda, 2009:18).

Keuangan daerah memiliki peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Keuangan daerah bersumber dari pendapatan yang dapat memberikan pemasukan kas daerah. sumber-sumber pemasukan ini tentunya perlu dikelola secara baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pinjaman Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan yang sah.

c. Pengelolaan Sumber Keuangan Daerah

Dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan public, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan perangkat daerah lainnya. (Huda, 2009:19).

6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;

- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- 4) Pengelolaan dan fasilitas kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Pertama, Penelitian Zaman Bahru dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pariwisata di Kabupaten Berau”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman, Tahun 2014. Penelitian tersebut membahas lebih fokus tentang Promosi Obyek Wisata, Pengembangan Obyek Wisata, Penyediaan Infrastruktur Pariwisata, serta Faktor Penghambat dan pendukung dalam melakukan Peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah melalui sektor pariwisata di Kabupaten Berau.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dinas pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui program-program promosi

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau, perbaikan dan pengembangan serta bekerjasama dengan mitra-mitra lainnya. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, belum semuanya kelompok pengrajin atau art gallery di objek wisata yang mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya. Selain itu promosi mengenai kebudayaan di Berau masih belum maksimal seperti kurangnya pusat informasi pariwisata.

Kedua, Penelitian Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, dkk dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)”. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Tahun 2014. Penelitian ini membahas lebih fokus tentang Strategi pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pariwisata di daerah terhadap pendapatan asli daerah antara lain, pengembangan obyek wisata, promosi wisata, dan pembinaan usaha pariwisata. Namun di dalam penerapan strategi tersebut

terdapat faktor pendukung dan penghambat yang muncul baik secara internal maupun eksternal.

Ketiga, Penelitian oleh Herru Prasetya Widodo dengan judul “Peranan Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Jurnal Reformasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribuwana Tungadewi, Malang, Tahun 2011. Penelitian tersebut membahas lebih fokus pada Peranan Dinas secara lebih transparan dalam meningkatkan PAD di Kota Malang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan dalam mempromosikan objek wisata, usaha meningkatkan PAD Dinas Pariwisata telah melaksanakan berbagai tindakan antarlain dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, penyediaan berbagai bentuk fasilitas atau perijinan, penyebaran informasi serta peningkatan peran masyarakat ditambah lagi dengan usaha menanggulangi hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. peranan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kota Malang sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan lagi dalam hal koordinasi dengan instansi atau pihak terkait serta hal teknisnya.

Keempat, Penelitian oleh Angga Pradika dengan judul “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati” Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013. Penelitian ini membahas lebih fokus tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan

obyek wisata Waduk Gunungrowo Indah, Strategi pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengembangkan obyek wisata Waduk Gunungrowo Indah dan Seberapa besar kontribusi obyek wisata Waduk Gunungrowo Indah untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor pendorong yaitu panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli serta suasana obyek wisata yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung obyek wisata sedangkan Faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana obyek wisata, dan berkembangnya obyek wisata lain yang meningkatkan persaingan. Perbaikan jalan yang rusak dan pelebaran jalan untuk akses bagi pengunjung sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang seperti membangun wahana permainan air, outbond, gardu pandang, kereta wisata dan fasilitas penunjang lainnya sehingga menarik pengunjung. serta Kontribusi Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah dari tahun ke tahun bila dilihat dari persentasinya masih cenderung sedikit sekali kontribusinya.

Kelima, Penelitian oleh Nita Bonita dengan Judul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Tahun 2016. Penelitian ini membahas lebih fokus tentang pengembangan prasarana dan sarana dan promosi wisata. Serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari prasarana dan sarana yang ada di kawasan wisata Labuan Cermin masih minim. Tidak adanya petugas keamanan dalam mengawasi kegiatan wisata juga masih kurangnya pemandu wisata. Selain itu dari segi promosi, Labuan Cermin dari sekian wisata bahari yang ada di Kabupaten Berau belum cukup dikenal oleh wisatawan lokal maupun asing. Promosi yang dilakukan masih kurang sehingga informasi yang didapat masih sedikit. Hal ini berdampak pada kurangnya pengunjung untuk berwisata ke Labuan Cermin.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, persamaan dan perbedaan yaitu Persamaanya dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang sama-sama meneliti peran Dinas Pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata. Perbedaannya dari penelitian yang relevan, lebih membahas mengenai strategi, pengembangan pariwisata, promosi pariwisata, serta kunjungan wisatawan yang dilakukan pada sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata. Belum ada yang membahas lebih dalam mengenai peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan dan menekankan peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berperan dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan, serta Evaluasi dalam pengelolaan obyek wisata.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang melandasi pemahaman secara keseluruhan dari masalah yang akan diteliti. Hubungan antara konsep-konsep masalah dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam kerangka berfikir berikut:

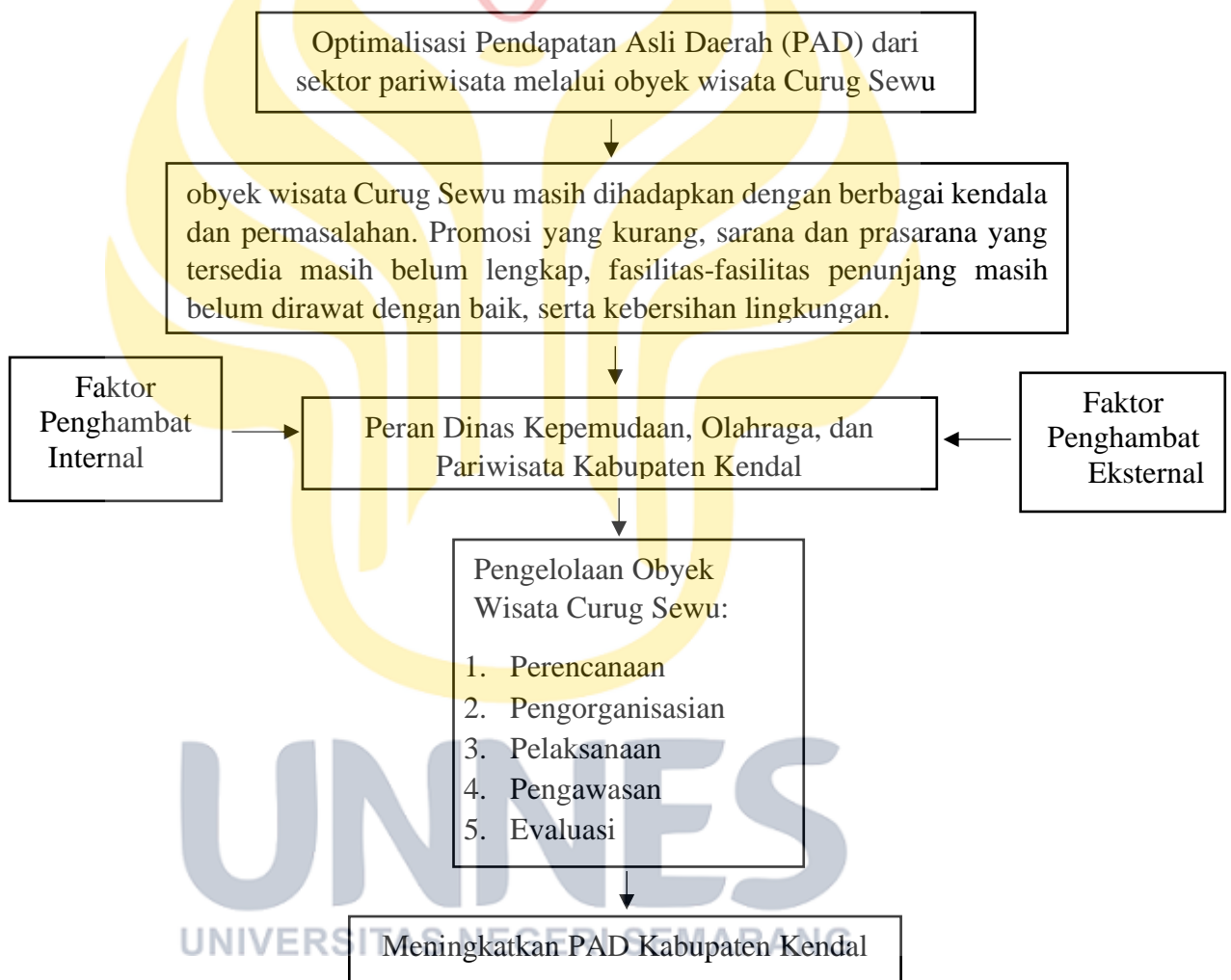
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan bagi pengembangan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, setiap daerah berhak untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang dimiliki untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

Sektor pariwisata saat ini merupakan sektor yang terus dikembangkan dan dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa daerah kota/kabupaten, tidak terkecuali di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata. Kabupaten Kendal dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, salah satunya melalui obyek wisata

Curug Sewu. Namun kenyataannya obyek wisata Curug Sewu memiliki potensi yang besar sebagai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal, akan tetapi pada kenyataannya obyek wisata Curug Sewu masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu. Pengelolaan yang belum maksimal karena obyek wisata ini masih dikelola oleh dua instansi yang berbeda yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan KPH Perhutani yang menyebabkan kurangnya promosi yang dilakukan, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum mengakomodir semua kepentingan wisatawan, dan fasilitas-fasilitas penunjang masih belum dirawat dengan baik. Disisi lain juga kurangnya tingkat kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata merupakan unsur yang berperan dalam melaksanakan urusan di bidang pariwisata. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari obyek wisata Curug Sewu dilakukan melalui pengelolaan obyek wisata yang baik dan terencana, pengelolaan yang dilakukan berdasarkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tentunya dalam proses pengelolaan obyek wisata Curug Sewu yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Bidang Pariwisata terdapat hambatan yang dialami baik secara internal maupun eksternal. Fungsi tersebut digunakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Bidang Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuat bagan kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka berfikir penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dalam pengelolaan obyek wisata Curug Sewu yaitu:
Pertama, Perencanaan dengan membuat rencana strategis (RENSTRA).
Kedua, Pengorganisasian dengan adanya penempatan dan pembagian tugas oleh Bidang Pariwisata. *Ketiga*, Pelaksanaan, dengan melakukan (1) Melakukan pembinaan kepada pegawai bidang pariwisata, pengelolaan obyek wisata Curug Sewu, dan pemandu wisata melalui pelatihan pemandu wisata; (2) Melakukan sosialisasi kepada pedagang yang berjualan di sekitar obyek wisata Curug Sewu dan wisatawan; (3) Mempromosikan obyek wisata Curug Sewu yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, Internet, Duta Wisata dan Pameran. *Keempat*, Pengawasan dan evaluasi dengan meninjau fasilitas yang berada di obyek wisata Curug Sewu agar tetap terawat dengan baik, meninjau mengenai pendapatan, yang kemudian diadakan evaluasi oleh Kepala Dinas. Tahun 2018 pendapatan yang diperoleh mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 974.203.000, dan berkontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2018 sebesar 335.842.483.242.00.

2. Faktor penghambat internal yang dialami oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek Curug Sewu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal adalah *Pertama*, faktor sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang pariwisata. *Kedua*, faktor masalah anggaran menjadikan pengelolaan obyek wisata Curug Sewu masih belum maksimal. Faktor penghambat eksternal yang dialami *Pertama*, faktor alam berupa binatang kera dan perubahan cuaca yang tidak menentu. *Kedua*, faktor lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, *Ketiga*, faktor promosi, sebetulnya sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan. *Kempat*, faktor Fasilitas yang masih belum memadai.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian, adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal disarankan untuk mengatasi permasalahan profesionalisme SDM dengan cara mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar pendidikan dan pengalaman di bidang pariwisata. Selain itu disarankan dilakukan menambahkan petugas kebersihan di obyek wisata Curug Sewu agar area obyek wisata lebih bersih dan rapi sehingga wisatawan yang berkunjung bisa nyaman.
2. Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal disarankan untuk menyediakan pawang untuk menangani kera-kera liar

yang ada di obyek wisata Curug Sewu yang bisa dijadikan daya Tarik wisata bagi para wisatawan yang berkunjung.

3. Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal sebaiknya perlu meningkatkan dan memperbanyak akses informasi yang dapat mendukung promosi obyek wisata Curug Sewu agar lebih dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.
4. Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal disarankan untuk lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di obyek wisata Curug Sewu. Perlu adanya penambahan fasilitas-fasilitas seperti restoran dan wahana permainan yang menarik minat pengunjung. Kemudian perlu diperhatikan mengenai perawatan fasilitas-fasilitas yang ada di obyek wisata Curug Sewu agar tidak rusak dan terbengkalai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahadjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- A.Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: PT Indeks
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Pustaka Utama
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada
- Enceng, Aries Djaenuri. 2018, *Sistem Pemerintahan Daerah*. Banten Universitas Terbuka
- Erlina, dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Aktrual, Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: PBFY-YOGYAKARTA
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Kaho Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Keating, Charles J. 1995. *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*. Yogyakarta:Kanisius
- Leiper, Neil. 1990. *Tourism System:An Interdisciplinary Perspective*. New Zealand: Departemen of Management System Bussines Studies Faculty, Massey University
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama

- M.Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bnadung: CV Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljadi, A.J. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muljadi A.J dan Warman Andri. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Ngafenan, Mohamad. 1996. *Kamus Parwisata*. Semarang: Dahara Prize
- Nurkholis, Hanif, dkk. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Pendit, Nyoman S.2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta:Pradya Paramita
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Pitana, I Gede dan Gayantri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Podo, Hadi. 2010. *Kamus Pintar Memilih Sinonim Indonesia-Inggris*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Purwanto, Iwan. 2006. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, campuran, Tindakan, Pengembangan*. Semarang:UNNES Press.
- 2015. *5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta:Magnum
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Siahaan, Mariot P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Siswanto, H.B. 2017. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretatif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Terry, George R. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ulfatin, Nurul dan Teguh Triwiyanto. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradya Paramitha
- Widjaja H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Jurnal

- Agustina, Lidya. 2009. *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja auditor*. Jurnal Akutansi Vol.1 No. 1 Mei 2009:40-69.
- Apriansyah, Migi, dkk. 2017. *Managemen (TBM) PKBM Anraguta Kota Bengkulu*. Jurnal of Community Development, Vol.1, No. 1.
- Ernawati, Baasit, Abdul Hadi. 2015. *Manajemen Penyelenggaraan Pengelolaan Obyek Wisata Air terjun Resun di Kabupaten lingga*. Jurnal FISIP, Vol.2 No.1 Februari 2015:1-10
- Batlajery, Semuel. 2016. *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. VII, No.2:135-155.
- Bonita, Nita. 2016. *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau*. Ejournal ilmu pemerintah. Fisip UNMUL. Vol. 4 No. 4: 1499-1510.
- Erawati Teguh, Hurohman Miftah. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015)*. Jurnal Akuntansi Dewantara UST Vol.1 No.2 Oktober 2017: 127-137.

- Maisarah. 2018. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Temburun di Kabupaten Kepulauan Anambas*. Jurnal Faperta, Vol.5 Januari-Juni 2018:1-21
- Nurhadi, Febrianti Dwi Cahaya, dkk. 2014. *Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.2, No.2:325-331
- Pradikta, Angga.2013. *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati* Jurusan ekonomi pembangunan. Vol 2. No 4.246-256.
- Sesen, Elif. 2015. *Role Theory and Its Usefulness In Public Relations*. European Journal Of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015. Pp 136-143
- Widodo, Heru Prasetya. 2011. *Peranan Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Reformasi, Vol.1, No.1, Juli-Desember 2011
- Zaman, Bahru. 2014. *Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pariwisata di Kabupaten Berau*. Ejournal Ilmu Pemerintah Fisip UNMUL, Vol. 2, No. 1, 2014: 1-10

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kendal
- Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021